

**KEKUATAN POLITIK IDE-IDE KEAGAMAAN:
Cak Nur, Politik Islam dan Fondasi Liberalisasi Indonesia**

Ali Munhanif

Pendahuluan

Untuk masa yang cukup lama, kecenderungan kuat yang terjadi dalam ilmu-ilmu sosial adalah ketidaksukaannya pada peran ide, pemikiran atau ideologi dalam melihat jalannya sejarah. Barangkali disebabkan oleh kuatnya pengaruh analisa struktural model Marxisme, atau juga dikarenakan kuatnya cengkeraman sekularisasi politik di negara-negara maju, sebuah pemikiran—apalagi pemikiran keagamaan—selalu dipinggirkan dari proses-proses politik. Bahkan mengamati arus perdebatan dalam ilmu sosial hingga akhir abad 20 lalu, ada kecenderungan untuk meminggirkan “peran pemikiran atau ideologi” sebagai bagian penting dari proses politik sebuah bangsa.

Pertama, ada kecenderungan untuk memandang pemikiran tersebut sebagai sebuah epifenomenon – fenomena akhir yang tidak penting. Ini artinya, suatu pemikiran atau ideologi dalam tatanan politik tidak bisa dianggap sebagai artikulasi utama tentang kepercayaan atau pemahaman suatu komunitas, tetapi sebagai sebuah manipulasi strategis atau posisi dari usaha untuk membungkus tujuan-tujuan tertentu yang dianggap lebih serius (Bates et all, 1998). Di sini, pemikiran keagamaan juga dianggap merupakan konsekuensi dari kepentingan-kepentingan kelembagaan yang lebih luas.

Kedua, ada kecenderungan umum di kalangan pemerhati masalah-masalah sosial yang mengatakan bahwa pemikiran atau ide dianggap sebagai hal sekunder terhadap faktor penjelas yang lebih prinsipil semacam kepemimpinan atau kekuasaan politik (Kalyvas, 2001:251-55; Schurzman, 1970). Dalam tataran ini, pemikiran bekerja atau beroperasi semata-mata sebagai perangkat untuk mengemas persoalan-persoalan yang rumit dari para aktor politik, dimana peranan, kepentingan dan posisi mereka melekat.

Kecenderungan semacam ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tetapi hal itu mengabaikan berbagai kenyataan politik yang bermunculan, di mana pemikiran atau ideologi sering memainkan peranan yang tegas dalam mengarahkan perubahan (Sewell, 1985; Smith, 1993; Skocpol, 1985; 1990; Berman, 1996). Bercermin pada kerangka ini, saya ingin mempergunakan pertemuan kita malam ini untuk membaca kembali

pembaharuan pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang pada awal dasawarsa 1970an menggemparkan masyarakat Islam di Asia Tenggara dengan deklarasinya “Islam Yes, Partai Islam No!”. Begitu juga pada dua dekade berikutnya, Cak Nur terus membanjiri umat Islam di Indonesia dengan berbagai wacana keagamaan seperti Islam yang inklusif, pluralisme agama, dan komitmen pada liberalisme agama.

Saya berpandangan bahwa baik pemikiran maupun aspek-aspek struktural yang lain merupakan elemen-elemen integral dalam pembentukan arah perubahan. Karenanya, mengikuti pandangan Sewell (1985) dan Theda Skocpol (1985) tentang pentingnya menempatkan ide atau gagasan politik untuk menjelaskan secara detail peristiwa-peristiwa bersejarah di dunia. Ketika sebuah gagasan politik menemukan artikulasinya yang sangat persuasif, didukung oleh para pelaku sejarah dengan posisi strategisnya akan terlihat secara jelas bahwa suatu pemikiran keagamaan sangat mungkin mempunyai kekuatan politik yang ampuh dalam membentuk arah sejarah suatu bangsa. Dengan kata lain, untuk menjelaskan pola perubahan politik Islam Indonesia pasca pembaharuan 1970, kita perlu memperhitungkan peran “Generasi Cak Nur” sebagai elemen penjelasan yang rinci dimana keterkaitan antara perubahan ideologi dengan pilihan-pilihan politik yang dibuat masyarakat Muslim sesudahnya bisa dilihat. Victor Hugo, sastrawan Perancis terkemuka, pernah mengatakan, “Jauh lebih ampuh dari ribuan pasukan tentara adalah, ketika sebuah gagasan telah tiba waktunya.”

Cak Nur dan Politik Islam 1960an

Salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan dalam melihat pembaharuan pemikiran Islam tahun 1970an adalah ia merupakan sebuah pilihan politik (*political choice*) dari sebuah generasi Muslim yang terlibat dalam upaya menyelesaikan problem-problem bangsanya. Secara tegas, pemikiran pembaharuan Cak Nur bernada Liberal dan atau Progresif¹ yang mewakili kecenderungan umum dari masyarakat Muslim Indonesia saat itu.² Di Indonesia sendiri, akar-akar

¹ Meski sebagian memandang Islam Liberal dan Islam Progresif sebagai identik, namun tak sedikit yang mendefinisikan keduanya secara berbeda. Omid Safi, Asisten Profesor Studi Islam di Universitas Colgate, Hamilton, New York, Amerika Serikat, berpandangan bahwa pemikiran Islam Progresif merupakan kelanjutan sekaligus berangkat dari tradisi Islam Liberal yang telah berumur 150 tahun. Kelompok liberal mendukung Islam yang secara umum menunjukkan identifikasi yang tanpa kritik terhadap modernitas, dan kerap kali mem-*by-pass* diskusi-diskusi tentang kolonialisme dan imperialisme. Lihat Omid Safi, “What Is Progressive Islam?”, *ISIM Newsletter*, No. 13, Desember 2003, hal. 48.

² Secara historis, pembaruan atau modernisasi dalam Islam dipahami sebagai gerakan kembali kepada Alquran dan hadis, dua sumber pokok ajaran Islam, yang telah tertutup oleh tradisi, adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran pokok Islam, serta kejumudan berpikir

gerakan pembaruan Islam umumnya dihubungkan dengan kebangkitan Islam di Indonesia pada awal abad 20 melalui berdirinya Muhammadiyah (1912) dan Persatuan Islam (Persis, 1923).³ Tetapi secara teologis, pemikiran pembaharuan Cak Nur melebihi upaya kaum modernis Muslim yang mengarahkan diri untuk memperkenalkan kembali doktrin Islam yang lebih murni dan mempromosikan ortodoksi dalam keyakinan dan praktik keagamaan.⁴

Penting untuk dicatat dari pesan pembaharuan Cak Nur adalah kritik terhadap pembaharuan lama yang telah melembaga. Pada awal 1970, Nurcholish Madjid muncul dengan proklamasi bahwa kaum Muslim Indonesia "telah mengalami kejumudan kembali dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam, dan kehilangan *psychological striking force* dalam perjuangannya." Cak Nur bahkan sampai pada kesimpulan bahwa organisasi-organisasi reformis, terutama Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis, telah mengalami stagnan dan kehilangan dinamismenya. Dalam istilahnya sendiri "... telah menjadi beku sendiri, karena mereka agaknya tidak sanggup menangkap semangat dari ide pembaruan itu sendiri, yakni dinamika dan progresivitas." Alasan-alasan inilah yang mendasari gagasan Nurcholish tentang "keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat."⁵

Namun demikian, dari semua hal yang paling berpengaruh adalah upaya serius untuk mencari opsi-opsi penyelesaian problem politik Islam, Pembaruan Cak Nur memandang pentingnya "sekularisasi" sebagai salah satu bentuk "liberalisasi" atau pembebasan terhadap pandangan-pandangan keliru yang telah mapan.⁶ Gagasan-gagasan yang dikemukakannya telah didiskusikan oleh sejumlah intelektual Yogyakarta, yang lebih dikenal sebagai kelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), pada tahun 1960-an. Beberapa di antaranya adalah A. Mukti Ali, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Dawam Rahardjo. Awalnya mereka tak mendapat dukungan dari lingkaran HMI sendiri. Namun,

dan sikap tertutup. Kembali kepada Alquran dan hadis berarti memakai ijtihad untuk menafsirkan kedua pokok ajaran Islam itu. Maka, pembaruan Islam diikuti oleh dibukanya kembali pintu ijtihad yang telah dinyatakan tertutup pada abad ke 12. Lihat Deliar Noer, "Harun Nasution dalam Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia," dalam *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989), hal. 83.

³ Martin van Bruinessen, *Liberal and Progressive Voices in Indonesian Islam*, Unpublished paper, hal. 1-2.

⁴ Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, (Jakarta: Serambi, 2004), hal. 21-22.

⁵ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 204-214.

⁶ M. Dawam Rahardjo, "Islam dan Modernisasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholish Madjid," dalam Madjid, *Islam, Kemodernan*, hal. 19.

dengan dukungan yang kuat dari rezim Orde Baru yang baru berkuasa, mereka bisa mencapai posisi yang berpengaruh. Mukti Ali diangkat sebagai Menteri Agama pada 1972-1978, dan dia membawa Djohan Effendi sebagai kepala penasihat dialog antar-agama. Dawam Rahardjo bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), sebuah LSM berorientasi pembangunan yang pertama di Jakarta. Sementara Cak Nur kemudian menginstitusionalisasikan gerakan pembaruan Islam dengan mendirikan kelompok kajian agama Paramadina pada 1986.⁷

Bagi kalangan yang akrab dengan situasi politik menjelang dideklarasikannya pembaharuan cak Nur, dengan segera akan melihat bahwa problem politik yang melanda umat Islam saat itu adalah pertentangan ideologis yang semakin tajam dan tak terkompromikan dalam perumusan dasar negara, apakah negara berdasarkan Pancasila ataukah berdasarkan Islam. Kenyataan ini seolah membayangi generasi muda Muslim masa itu untuk memilih, tetap berpegang pada cita-cita politik Negara Islam atau meninggalkannya untuk secara perlahan membebaskan Islam dari belenggu politik partai-partai Islam.⁸

Kegagalan demi kegagalan telah melanda perjuangan politik Islam. Dari perjuangan dengan jalan kekerasan militer, hingga perjuangan dalam perdebatan konstituante, telah mendorong umat Islam menjadi kelompok yang terus menjadi sasaran kecurigaan. Ketika kondisi ini mencapai puncaknya pada dasawarsa 1960an, yakni ketika kaum Muslimin selalu diposisikan beroposisi terhadap kekuasaan kekuasaan negaera, Cak Nur dan generasinya ingin tampil dengan cita-cita politik yang sama sekali baru. Di masa Demokrasi Terpimpin ini, dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya (seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara) terlibat dalam pemberontakan PRRI, Soekarno membubarkan Masyumi pada 17 Agustus 1960.⁹ Meski, berdasarkan dokumen politik, indikasi keterlibatan langsung Masyumi dengan PRRI tidak terbukti. Yang terjadi adalah dukungan para pemimpin Masyumi di atas terhadap perjuangan daerah menekan pemerintah pusat.¹ Dan dengan semakin tersudutnya kelompok Islam yang berafiliasi pada Masyumi, maka generasi Muslim pun terdorong untuk muncul sebagai kekuatan Islam yang lain.¹ Implikasinya, generasi ini tampaknya harus memilih menjadi martyr untuk mengubur cita-cita Masyumi.

⁷ Bruinessen, *Liberal and Progressive Voices*, hal. 4-9.

⁸ Boland, *Pergumulan Islam*, hal. 104-105.

⁹ Effendy, *Islam dan Negara*, hal. 111.

¹ Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 179.

¹ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986), hal. 89.

Dalam konteks upaya menyelesaikan problem politik antara Islam dan cita2 keIndonesiaan secara luas itulah pembaharuan pemikiran Cak Nur mengemuka. Pokok pemikiran Cak Nur yang bisa dianggap sebagai peletak cita-cita Liberal¹ adalah gagasannya² tentang sekularisasi. Gagasan itu pertama kali Cak Nur publikasikan lewat tulisannya pada 1968 yang berjudul “Sekularisasi adalah Rasionalisasi, Bukan Westernisasi”, kemudian disusul dengan tulisan yang sangat menghebohkan bertitel “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” (1970). Apa yang menjadi concern saya adalah, persoalan yang tidak atau belum terselesaikan menyangkut dasar negara telah menempatkan posisi generasi Muslim 1960an serba tidak menguntungkan. Pembaharuan Cak Nur hadir untuk mendobrak semua kebekuan itu. Melalui tulisan pada 1968, Cak Nur sebenarnya mencoba membangunkan umat Islam dari “tidur panjang” dogmatismenya. Cak Nur ingin mengingatkan sekaligus mengajak umat Islam untuk kembali menggunakan rasio, menggunakan akal budinya dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Lebih khusus, Cak Nur memaksudkan tulisannya itu sebagai dorongan kepada umat Islam untuk memilih cita-cita Islam yang lebih substantif dan menyeluruh. Tidak lagi pada perjuangan konstitusional negara Islam, melainkan pada membangun Islam Indonesia yang menerima dan diterima semua pihak¹. Cak Nur bahkan menegaskan bahwa modernisasi, yang berarti rasionalisasi, adalah perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar.

Kondisi serupa juga terjadi di ranah politik kenegaraan. Di sini, pada saat itu, umat Islam Indonesia tidak bisa membedakan urusan yang benar-benar agama dan yang semata duniawi. Tokoh politik persis memanfaatkan kondisi demikian untuk kepentingan akumulasi perolehan suara partainya. Cak Nur ingin menyadarkan umat bahwa

¹ Ulil Abshar-Abdalla, tokoh Jaringan Islam Liberal, menempatkan Cak Nur, di samping juga Gus Dur, sebagai pengusung awal gerakan Islam Liberal di Indonesia. Bagi Ulil, baik Cak Nur maupun Gus Dur adalah tokoh-tokoh yang paling mempengaruhi perjalanan Islam Liberal di Indonesia. Keduanya memiliki proporsinya masing-masing untuk hal itu. Khusus untuk Cak Nur, menurut Ulil, tulisan-tulisannya sangat berpengaruh dan begitu liberal terutama jika dikaitkan dengan konteks Indonesia yang pada saat itu berada dalam kekuasaan rezim Orde Baru dengan kecenderungan praktik keagamaan umatnya, terutama Islam, yang tradisional dan mistis. Umat Islam Indonesia pada saat itu hampir tak dapat membedakan yang mana ibadah yang bersifat transenden dan praktik duniawi yang semestinya tak bersifat agama atau ilahiyah. *Wawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla* di Jakarta pada Senin, 13 Juli 2009.

² Ulil Abshar-Abdalla, dalam³ sebuah seminar yang diadakan Jaringan Islam Liberal, bahkan menganggap ilmu pengetahuan modern saat ini telah memerankan fungsi yang sama sebagaimana dulu hanya diperankan oleh agama. Menurut Ulil, manusia membutuhkan peta bagi kehidupan, ilmu pengetahuan dan agama (pada masanya) adalah peta yang bisa memberi petunjuk bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (lahir dan batin) itu. Artinya, tak ada yang harus dipertentangkan antara capaian akal (ilmu pengetahuan) dengan tuntunan wahyu (ajaran agama). Lihat Saidiman, dalam reportase diskusi JIL, “Agama Lama dengan Baju Baru”.

masalah politik adalah masalah yang tidak terkait dengan urusan agama atau ibadah. Cak Nur kemudian tampil dan menggemparkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam, dengan melontarkan pernyataan “Islam Yes, Partai Islam No”, dengan bahasa yang lebih keras, sebenarnya kalimat ini juga mengingatkan “Islam yes, Negara Islam No.”¹ Slogan besar itu Cak Nur keluarkan mengingat partai-partai Islam saat itu seolah sudah menjadi “kultus tersendiri” bagi umat Islam Indonesia. Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar.

4

Reproduksi Pembaharuan dan Pelembagaannya

Segera setelah pembebasan Islam dari stagnasi kelembagaan pembaharuan itu, pemikiran Cak Nur mereproduksi diri dalam berbagai organisasi, aktivisme dan program sosial politik. Pertama tentu saja adalah langkau komunitas Muslim untuk mendekatkan diri dengan negara. Abdurrahman Wahid bersama sejumlah aktivis muda NU kemudian terlibat dalam program melibatkan pesantren dalam pembangunan masyarakat dan transformasi sosial. Mereka mendirikan sejumlah LSM yang berkonsentrasi pada penerjemahan bahasa fikih dalam mengakomodasi ide-ide modern dan menjadikannya relevan dengan persoalan-persoalan sosial. Salah satu yang terkenal adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M),¹ berdiri pada 1983, dan diketuai oleh intelektual muda progresif Masdar F. Mas’udi. Dari rahim NU dan P3M ini kemudian lahir Jaringan Islam Emansipatoris (JIE) yang menawarkan paradigma keberagamaan yang menjadikan pencarian solusi atas problem kemanusiaan dalam kehidupan rill sebagai komitmen utama agama. Selain melakukan studi dan penelitian, aktivitas P3M dan JIE meliputi pendidikan dan pelatihan, penerbitan, advokasi, dan seminar.

5

Sementara itu, di dalam tubuh NU sendiri didirikan Lembaga Kajian dan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nadlatul Ulama pada 1985

¹ Cak Nur mengatakan “...jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide itu sekarang dalam keadaan tidak menarik. Dengan perkataan lain, ide-ide dan pemikiran-pemikiran Islam itu sekarang sedang menjadi *absolute* memfosil, kehilangan dinamika. Ditambah lagi partai-partai Islam tidak berhasil membangun image positif dan simpatik, bahkan yang ada ialah image sebaliknya (...umpanya korup)”. Uraian lebih lengkap pemikiran Cak Nur yang begitu terkenal ini dapat dilihat di Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, h. 204-205.

¹ Staf-staf ahli P3M ketika berdiri terdiri dari beragam latar belakang antara lain Ivan A. Haidar (antropologi), Dr Mansour Faqih (andragogy), Lies Marcoes-Natsir (gender), Helmi Ali (pelatihan), Muchtar Abbad (pengembangan masyarakat) dan Wardah Hafidz (pelatihan gender). Sementara itu, dewan pendiri P3M terdiri dari KH Jusuf Hasyim, KH Sahal Mahfudh, Dr Tuty Alawiyah, KH Abdurrahman Wahid, Adi Sasono, Soetjipto Wirosarjono, M. Dawam Rahardjo. Dewan Pengurus diketuai Masdar F. Mas’udi.

di Jakarta. Lakpesdam menjadi salah satu perangkat organisasi NU yang diberi mandat untuk menyelenggarakan program kajian, pendidikan, dan penerbitan dalam rangka ikut serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan demokratis.

Pada tahun 1990-an, corak pembaruan Islam progresif model kelompok tradisional ini diwarisi oleh kelompok diskusi yang mentransformasi diri menjadi LSM, LKiS. Sebagian besar aktivisnya adalah mantan santri dan mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga. Lingkaran studi ini menerbitkan buku, menggelar seminar, serta demonstrasi dengan gerakan mahasiswa lainnya dalam isu-isu seperti soal tanah, tenaga kerja wanita, dampak pembangunan, dan sastra pembebasan. Sejak 1997, LKiS menjadi yayasan, yang secara lebih sistematis melakukan penelitian, kajian regular, pendampingan masyarakat, menerbitkan buletin Jumat *Al-Ikhtilaf*, *talkshow* di media, program *audio-visual*, advokasi kebijakan pemerintah lokal, dan kegiatan-kegiatan lain.

Sebagai salah satu hasil pelatihan LKiS Yogyakarta, didirikan Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia (LKHAM) di Tasikmalaya pada 1999. LKHAM merupakan LSM yang mewadahi santri dan pesantren di Tasikmalaya yang meyakini kesesuaian antara Islam, HAM, dan demokrasi. LKHAM berusaha menjadi *counter-movement* bagi gerakan Islam formalis di Tasikmalaya, dengan visi dan misi Islam transformatif dan toleran, untuk membangun masyarakat sipil yang kritis dan mandiri.

LKiS juga menjalin kemitraan dengan Lembaga Advokasi dan Pendidikan Rakyat (LAPAR) di Sulawesi Selatan yang didirikan pada 1999. LAPAR menjalin hubungan dengan mahasiswa, petani, dan kaum miskin kota. Mereka berupaya menangani isu-isu strategis seperti wacana pembebasan, budaya lokal, dan advokasi. Sejak munculnya isu dan fenomena riil formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan, LAPAR termasuk yang paling aktif melakukan *counter-hegemony* di Bulukumba dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan yang semarak mengeluarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa bernuansa Syariat Islam.

Pada era 2000an, muncul sebuah gerakan yang menamakan diri Jaringan Islam Liberal (JIL)¹ terbilang paling baru, namun dianggap paling vokal, terutama dalam menyuarakan gagasan-gagasan Islam

¹ JIL adalah komunitas yang mengkaji dan mengetengahkan perbincangan mengenai visi keislaman yang toleran, terbuka, dan mendukung penguatan proses demokratisasi di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan JIL meliputi unjuk-wicara (*talk-show*) mingguan yang disiarkan di seluruh Indonesia melalui radio 68H Jakarta, sindikasi artikel-artikel berkualitas yang disiarkan media-media daerah di seantero nusantara, penerbitan buku, serta layanan informasi publik melalui situs www.islamlib.com. Lihat *back-cover* dalam Luthfi Assyauckanie (ed), *Wajah Liberal Islam Di Indonesia*, (Jakarta: JIL dan TUK, 2002).

Liberal yang berakar pada pemikiran kelompok Nurcholish sebagai generasi pendahulunya. JIL adalah representasi penuh gerakan dan pemikiran Islam liberal di Indonesia kontemporer. Munculnya JIL terkait erat dengan proses demokratisasi Indonesia setelah jatuhnya Soeharto pada 1998. Periode transisi demokrasi ini menyaksikan munculnya sejumlah ekspresi fundamentalisme dan radikalisme Islam yang direpresentasikan oleh organisasi-organisasi seperti Front Pembela Islam (1998), Laskar Jihad (1999), Majelis Mujahidin Indonesia (2000), dan Hizbut Tahrir Indonesia,¹ serta di ranah politik⁷ berdiri Partai Keadilan (1998).¹ Selain mendukung implementasi hukum Islam di Indonesia, organisasi-organisasi tersebut terlibat dalam meningkatnya konflik kekerasan agama, khususnya antara Islam dan Kristen, melalui mobilisasi para pejuang Islam di wilayah konflik. Pendirian JIL dimaksudkan untuk merespons aktivisme militan dan radikalisme Islam tersebut.¹

9

Meskipun lebih belakangan dari generasi muda NU, kader-kader muda Muhammadiyah pun muncul ke permukaan wacana pemikiran Islam dengan pendekatan-pendekatan alternatif. JIMM berdiri pada bulan Oktober 2003, di Bogor, melalui sebuah *workshop* yang diorganisir oleh Ma'arif Institute for Culture and Humanity, Jakarta. Tokoh penting di balik kelahiran JIMM adalah Moeslim Abdurrahman dan Syafii Maarif. JIMM melakukan kajian-kajian dan penerbitan buku dan jurnal. Munculnya JIMM dilatarbelakangi banyaknya kritik terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang mengalami stagnasi dalam pemikiran. Seperti dipersepsi aktivisnya, Muhammadiyah tidak berdaya menghadapi gempuran problem sosial, eksekutif globalisasi, neokapitalisme, dan liberalisme. Menurut kalangan mudanya, Muhammadiyah terjebak rutinitas aktivisme yang menumbuhkan kejumudan, birokratisme dan pragmatisme, bahkan terjerembab pada politik praktis.

Perubahan Struktur Politik dan Implikasinya

Dari semua hal yang digambarkan sebagai dinamika internal umat Islam, hal yang terpenting dari efek pembaharuan Cak Nur adalah keputusan pemerintah Orde Baru untuk mengadopsi pemikiran itu untuk meluncurkan kebijakan modernisasi keagamaan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pertentangan ideologis yang tak terkompromikan

¹ Tentang gerakan-gerakan Islam radikal, lihat Jamhari dan Jajang Jahroni (ed), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2004)

¹ Tentang sejarah PK, lihat Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Bandung: Teraji, 2002).

¹ Nicolaus Teguh Budi Harjanto, "Islam and Liberalism in Contemporary Indonesia: The Political Ideas of *Jaringan Islam Liberal* (The Liberal Islam Network)." Tesis MA Tidak Diterbitkan. (Athens: College of Arts and Sciences, Ohio University, 2003), hal. 8.

dalam perumusan dasar negara, mendorong semua pemerintahan Presiden Soekarno dan Suharto mengambil inisiatif, melakukan pendekatan terhadap umat Islam

Terkait Piagam Jakarta yang menjadi pokok utama perdebatan, Orde Baru berpandangan bahwa UUD 1945 dijiwai oleh Piagam Jakarta dan bahwa keduanya merupakan kesatuan. Orde Baru membuat keputusan bersejarah untuk terus menggalakkan kegiatan agama, tetapi pada saat yang sama bersikap keras terhadap politik keagamaan. Piagam Jakarta, yang merupakan suatu “dokumen historis” yang mempunyai peran yang berpengaruh dalam perumusan UUD 1945, diakui sebagai bagian penting dalam perumusan dasar negara. Tetapi pada saat yang sama pengakuan tersebut merupakan indikasi adanya posisi khusus yang dimiliki umat Islam.²

Meski bersikap keras terhadap pemimpin golongan Islam dan kelompok politik, dengan kebijaksanaan politik yang kurang menguntungkan bagi perkembangan politik Islam, namun Suharto juga melakukan langkah-langkah yang penting bagi akomodasi kepentingan Islam di lembaga-lembaga kenegaraan. Suharto dinilai memberi peluang bagi Islamisasi di birokrasi. Ia, misalnya, berinisiatif memberi ruang besar terhadap Departemen Agama, membentuk MUI, mendirikan bank Islam, dan hari besar Islam lain di lingkungan Istana Merdeka. Di masanya juga diadakan Festival Istiqlal. Dengan bukti-bukti itu, Bahtiar Effendy menilai bahwa kebijakan-kebijakan Soekarno tersebut mengarah pada “akomodasionisme Islam”. Pendeknya, jika para pemimpin Islam berusaha keras agar gagasan Islam sebagai dasar negara diterima, Suharto justru lebih memilih jalan mengkooptasi politik Islam, sambil mengubah struktur politik negara yang penuh dengan kekuatan simbolik Islam. Sehingga, di masanya, perkembangan pembaharuan Islam menunjukkan dimensi-dimensi politisnya.²

Satu jasa besar Cak Nur dalam periode ini adalah upayanya yang konsisten terhadap pandangan inklusif dan plural dalam beragama. Hal itulah yang hingga akhir hayatnya coba ia bangun dan ia terapkan kepada umat Islam secara lebih luas, baik di Indonesia maupun di dunia. Inklusivisme dan pluralisme yang melekat dan menjadi *core* pemikiran Cak Nur sekaligus adalah pengaruh besar bagi gerakan Islam liberal di Indonesia hingga saat ini.

Terutama sejak mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina pada 1986, dilanjutkan dengan pendirian Universitas Paramadina pada 1998, Cak Nur coba menginstitusionalisasi corak pemahaman yang inklusif dan plural dalam memahami agama. Lewat yayasan yang didirikannya itu, Cak Nur

² Boland, *Pergumulan Islam*, hal. 105.

² Ali dan Effendy, *Merambah¹Jalan Baru Islam*, hal. 91.

ingin mewujudkan sebuah lembaga keagamaan yang menyadari keterpaduan antara keislaman dan keindonesiaan sebagai perwujudan dari nilai-nilai Islam yang universal, dengan tradisi lokal Indonesia. Yayasan itu dirancang untuk menjadi pusat kegiatan keagamaan yang kreatif, konstruktif dan positif bagi kemajuan masyarakat, tanpa sikap-sikap defensif dan reaktif. Program pokok kegiatannya berkisar pada peningkatan dan penyebaran paham keagamaan Islam yang luas, mendalam dan bersemangat keterbukaan.²

Pemikiran inklusif dan plural Cak Nur menginspirasi banyak kalangan untuk memahami dan mendekati doktrin-doktrin agama secara terbuka. Dengan perangkat itu agama benar-benar terasa beroperasi tidak hanya di langit, melainkan juga di bumi. Agama menjadi tongkat penuntun praktik hidup yang damai, saling menghargai, tidak menegasikan satu sama lain. Tidak seperti kerap dipahami sebagian penganut lain yang memposisikan keyakinan pribadi agamanya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap penganut agama lain, atau bahkan keyakinan lain meski dalam satu agama. Keterbukaan memahami doktrin agama pada gilirannya menjadi strategi komunikasi tersendiri dalam konteks dialog antar-agama.

Dengan begitu, tak aneh kalau konsistensi pemikiran Cak Nur berbuntut pada *positioning* dirinya dalam kancah pemikiran Islam yang seolah menjadi “madzhab” tersendiri di antara varian-varian kiblat pemikiran yang telah ada. Ide-idenya kemudian dikenal luas dengan sebutan “Teologi Inklusif Cak Nur”.² Teologi ini berangkat dari pemahaman terhadap pesan Tuhan. Cak Nur menempatkan semua kitab suci agama-agama *Abrahamic* (agama *samawi*) sebagai pesan Tuhan. Ia bersumber dari Yang Satu, meskipun manifestinya beragam. Cak Nur, secara genuin, memperkenalkan konsep *kalimat sawa* sebagai titik pertemuan agama-agama.² Dari titik pertemuannya itu, pada dasarnya,

² Lihat [file:///D:/yayasan wk Paramadina.html](file:///D:/yayasan%20Paramadina.html)

² Lihat Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, (Jakarta: Kompas, 2001).

² Dalam catatan kaki buku *Islam Pluralis*, Budhy Munawar-Rachman menyatakan bahwa konsep *kalimat sawa* yang dimaksud Cak Nur adalah kalimat, ide, atau prinsip yang sama, yakni ajaran bersama yang menjadi “*common platform*” antara berbagai kelompok mausia, berbagai umat beragama. Titik yang mempertemukan agama-agama samawi itu adalah pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Benar belaka, lanjut Budi, karena semua agama samawi mengandung pesan besar yang sama, yakni untuk bertakwa kepada Allah. Takwa yang tidak semata diartikan sebagai menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, melainkan menyangkut “Kesadaran Ketuhanan” (*Good-consciousness* atau *rabbaniyah*). Lihat Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 55 dan 57. Lihat juga Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, yang dalam kata pengantarnya mengatakan bahwa titik temu antar-agama samawi, baik yang diturunkan kepada Nabi Nuh, Musa, Isa, atau Muhammad adalah pada pesan besar monoteis itu. Bahkan, dengan mengutip hadits, Nabi Muhammad mengatakan, “Para nabi itu bersaudara, ibu-ibu mereka berlainan, namun agama mereka satu.”

semua agama samawi berasal dan kembali akan menuju pada titik yang sama. Karenanya tak elok jika saling menyalahkan atau meniadakan. Hubungan paling ideal di antaranya adalah saling menghargai dan mengakui kebenaran serta keberadaan satu sama lain (koeksistensi). Dari konsep itulah bangunan besar inklusivisme Cak Nur lantas memperoleh fondasinya.

Tulisan ini pernah disampaikan pada acara Kajian TITIK-TEMU dengan tema “Dibalik Gagasan-gagasan Nurcholish Madjid”, Kamis, 23 Mei 2013